

**ANALISIS *CRITICAL SUCCESS FACTOR* PENERAPAN SISTEM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI PEMERINTAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (KASUS: JOGJAPLAN)**

Riana
riana91@mail.ugm.ac.id

Fu'ad Rakhman
frakhman@ugm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *critical success factor* dalam penerapan sistem perencanaan pembangunan daerah di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Jogjaplan).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada empat orang narasumber yang terlibat dalam penerapan Jogjaplan. Teknik analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Untuk memastikan agar temuan tidak memberikan kesimpulan yang berbeda maka dilakukan uji validitas data melalui triangulasi sumber dan teknik, serta *member checking*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah DIY membangun dan menerapkan sistem teknologi informasi pada bidang perencanaan pembangunan daerah. Sistem tersebut diwujudkan dalam bentuk aplikasi yang diberi nama Jogjaplan. Sejak tahun 2013, Jogjaplan mengantarkan Pemerintah DIY mendapatkan anugerah Pangripta Nusantara dari Bappenas sebagai provinsi yang memiliki perencanaan terbaik. Adapun *critical success factor* dalam penerapan sistem perencanaan pembangunan di Pemerintah DIY (Jogjaplan), yaitu komitmen pimpinan yang kuat dari Gubernur DIY, sumber daya manusia, regulasi, kelembagaan, serta infrastruktur jaringan dan *server*.

Kata kunci: *critical success factor*, penerapan, perencanaan, jogjaplan.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meraih penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara 2017 dalam kategori provinsi dengan perencanaan terbaik

(Bappenas, 2017). Penghargaan tersebut bukan penghargaan pertama kali yang diterima oleh Pemerintah DIY, tetapi sudah diterima sejak tahun 2013. Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara merupakan

penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengapresiasi kinerja pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang berprestasi dalam merencanakan pembangunan. Penghargaan tersebut bertujuan untuk mendorong setiap pemerintah daerah dalam menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, sinergis, terukur, dan dapat dilaksanakan; sekaligus menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan perencanaan yang lebih baik dan bermutu (Bappenas, 2017).

Dalam menjalankan fungsi perencanaan, Pemerintah DIY menggunakan Jogjaplan, yaitu sebutan untuk aplikasi *e-Planning*. Melalui *Jogjaplan* Pemerintah DIY dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan memperkecil jumlah kegiatan. Pada tahun 2017 realisasi kegiatan Pemerintah DIY sebesar 855 kegiatan. Jumlah tersebut

berkurang sekitar 74,5 persen dari jumlah kegiatan pada tahun 2014, yaitu sebanyak 3.500 kegiatan. Semakin berkurangnya jumlah kegiatan disebabkan kebijakan Gubernur DIY memfokuskan kegiatan yang memiliki daya ungkit dan *output/outcome* yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Kegiatan yang tidak langsung mendukung pencapaian *outcome* dikurangi, seperti melakukan penghematan terhadap sejumlah belanja rutin, mengurangi jumlah rapat-rapat, FGD (*focus group discussion*), *workshop*, dan mengurangi intensitas perjalanan dinas luar daerah.

Jogjaplan merupakan bagian dari *e-government*. Jogjaplan merupakan inovasi pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah DIY dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik sesuai dengan amanat Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Jogjaplan merupakan sistem perencanaan yang dibangun

berdasarkan proses bisnis perencanaan yang menjadi *core business* Bappeda DIY. Sebagai alat, Jogjaplan berguna untuk memudahkan penyelesaian pekerjaan aparatur dalam menyelesaikan perencanaan, seperti RKPD sampai dengan KUA PPAS dan perubahannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *critical success factor* dalam penerapan sistem perencanaan pembangunan di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Jogjaplan).

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Critical Success Factor* (CSF)

CSF ialah sejumlah area terbatas mencakup pada suatu proyek atau industri tertentu yang menghasilkan keunggulan daya saing bagi individu, departemen, atau organisasi (Bullen dan Rockart, 1981). Dengan demikian, CSF merupakan suatu hal yang harus berjalan dengan benar pada proyek atau program organisasi agar tujuan dapat tercapai. Menurut Ram dan Corkindale (2014), konsep CSF menjanjikan cara yang sistematis dalam mengidentifikasi bidang umum yang membutuhkan

perhatian manajemen dalam rangka mencapai tujuan kinerja.

Menurut Esteves dan Pastor (2000) bahwa definisi dan pengukuran kesuksesan implementasi ERP (*enterprise resource planning*) merupakan masalah pelik. Hal tersebut bergantung pada siapa yang mendefinisikannya. Menurut Nah, dkk. (2003) ada lima CSF dalam implementasi ERP, antara lain: dukungan manajemen puncak, *project champions*, kerjasama dan kompetensi tim ERP, manajemen proyek, dan program manajemen perubahan dan budaya. Lebih lanjut, menurut Napitupulu (2014) terdapat lima belas CSF implementasi *e-government* di Indonesia, yaitu: infrastruktur, kelembagaan, kepemimpinan, kebijakan, aplikasi, manajemen perubahan, budaya organisasi, investasi TI, kolaborasi, perencanaan, komunikasi, sosialisasi, BPR, manajemen proyek, dan keterlibatan *stakeholder*.

2.2 **Perencanaan Pembangunan Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, perencanaan ialah suatu

proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun perencanaan pembangunan daerah ialah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu (Permendagri No. 54/2010).

Terdapat tiga perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terpadu oleh pemerintah daerah, yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (UU No. 24/2005).

2.3 E-Government dan Faktor Kegagalan dalam Implementasinya

Menurut World Bank (2009), *e-government* merujuk pada penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah yang bertujuan untuk melibatkan pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat dalam hubungan tata pemerintahan (*governance*) yang lebih efisien, efektif, produktif dan responsif. Pelaksanaan *e-government* bertujuan untuk mempermudah dalam penyampaian layanan-layanan pemerintah kepada masyarakat dengan cara yang lebih efektif (Lee dalam Andriariza, 2013). Pelaksanaan *e-government* dalam memberikan layanan dapat berupa layanan antar lembaga pemerintah (G2G), layanan antara lembaga pemerintah dengan masyarakat (G2C), dan layanan lembaga pemerintah dengan bisnis (G2B) (Indrajit, 2002).

Meskipun *e-government* memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah, namun penerapan *e-government* tidaklah mudah dan dapat menyebabkan kegagalan.

Menurut Lee dalam Andriariza (2013), kegagalan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor, yaitu: (1) kurangnya kesepakatan dalam sistem administrasi publik: penolakan internal oleh pemerintah; (2) kurangnya rencana dan strategi: *e-government* diperkenalkan setengah-setengah dan tidak sistematis; (3) kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang TI, serta kurangnya pengembangan kapasitas institusi dan personel; (4) ketidakmatangan teknologi terlalu menekankan teknologi atau penerapan berorientasi teknologi; (5) kurangnya vendor sistem dan TI yang menyediakan infrastruktur dan aplikasi TI dalam mendukung implementasi *e-governement*; (6) tidak adanya rencana investasi; dan (7) implementasi yang terburu-buru tanpa persiapan dan pengujian yang cukup.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan

cara wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada empat orang narasumber yang terlibat dalam penerapan Jogjaplan. Teknik analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman (2014) yang terdiri atas tiga kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Untuk memastikan agar temuan tidak memberikan kesimpulan yang berbeda maka dilakukan uji validitas data melalui triangulasi sumber dan teknik, serta *member checking*.

4. ANALISIS DAN DISKUSI

4.1 Gambaran Umum Sistem Perencanaan Pembangunan Pemerintah DIY (Jogjaplan)

Pemerintah DIY mulai mengembangkan dan menerapkan *e-government* dalam pelayanan publik atau yang dikenal dengan *Digital Government Services* (DGS) sebagai tindak lanjut dari Inpres 3/2003. DGS merupakan bagian integral dari pengembangan Jogja *Cyber Province* (JCP) yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2006. Penerapan *e-*

government atau DGS DIY awalnya hanya difokuskan pada enam program unggulan. Kemudian, *e-government* DIY melebar pada bidang perencanaan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam aplikasi Jogjaplan.

Jogjaplan merupakan inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah DIY. Secara umum, penerapan Jogjaplan dilakukan dengan tujuan, antara lain, sebagai berikut: (1) mengubah cara kerja atau metode organisasi dalam perencanaan pembangunan daerah yang dulunya sulit, lambat, mahal, tertutup, dan *shopping list* menjadi mudah, cepat, murah, transparan, dan *working plan*; (2) mendukung gerakan *Open Government* Indonesia (OGI) dan *One Agency One Innovation*; (3) percepatan peningkatan pelayanan publik; (4) meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan (5) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menekankan pada akuntabilitas kinerja serta pentingnya transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta pertanggungjawaban

penggunaan anggaran yang berbasis pada kinerja.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah DIY sudah membangun dan menerapkan Jogjaplan. Jogjaplan merupakan sistem manajemen perencanaan pembangunan berbasis IT, yang senantiasa menyesuaikan kebutuhan dan tuntutan zaman, dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

DIY mulai mengembangkan sistem perencanaan sejak tahun 2007 yang bernama sistem informasi perencanaan. Sistem tersebut digunakan untuk meng-*input* rencana program dan kegiatan pada proses perencanaan. Diawal peluncurannya, sistem ini masih jauh dari kata sempurna. Bappeda DIY selaku pihak yang bertanggung jawab atas sistem informasi perencanaan, terus melakukan perbaikan dan pengembangan sistem.

Jogjaplan merupakan aplikasi perencanaan pembangunan yang memungkinkan publik melihat langsung rencana pembangunan, mengawasi, dan memberikan

masuk ke Pemda DIY. Nama lain Jogjaplan ialah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPERDA). Jogjaplan merupakan sebuah alat penyusunan RKPD sampai dengan KUA PPAS provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri 54/2010. Dengan adanya alat bantu Jogjaplan, Bappeda DIY dapat memaksimalkan fungsi Bappeda DIY sebagai fungsi perencana, pengendali, dan evaluator karena semua telah disusun otomatis oleh sistem dan sistem juga mampu menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan (Bappeda DIY, 2014). Jogjaplan dapat diakses melalui <http://jogjaplan.com>.

Melalui Jogjaplan, Pemerintah DIY mampu memperbaiki permasalahan penganggaran berdasarkan logika *cascade* yang berorientasi pada hasil. Adanya *cascade*, Pemerintah DIY dapat melakukan sejumlah rasionalisasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak langsung mendukung terhadap capaian

outcome, seperti: melakukan penghematan terhadap sejumlah belanja rutin, mengurangi jumlah rapat-rapat, dan mengurangi intensitas perjalanan dinas luar daerah.

4.2 Critical Success Factor Penerapan Sistem Perencanaan Pembangunan Pemerintah DIY (Jogjaplan)

Meskipun penerapan *e-government* memberikan berbagai manfaat dan keuntungan yang besar, namun pada banyak kasus, penerapan *e-government* mengalami kegagalan khususnya di negara berkembang. Di negara berkembang, kegagalan penerapan *e-government* mencapai 85 persen (Heeks dalam Napitutu, 2014). Oleh sebab itu, memahami faktor-faktor positif yang mempengaruhi penerapan *e-government* akan membantu organisasi mengembangkan strategi saat melakukan implementasi (Dooley dan Sharon, dalam Suryani, 2011).

Pemerintah DIY membangun dan menerapkan sistem teknologi informasi dibidang perencanaan pembangunan daerah. Sistem

tersebut diwujudkan dalam bentuk aplikasi yang diberi nama Jogjaplan. Sejak tahun 2013, Jogjaplan mengantarkan Pemerintah DIY memperoleh anugerah Pangripta Nusantara dari Bappenas sebagai provinsi yang memiliki perencanaan terbaik. Adapun CSF dalam penerapan sistem perencanaan pembangunan di Pemerintah DIY (Jogjaplan), antara lain, sebagai berikut.

a. Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan yaitu Gubernur DIY merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kesuksesan penerapan Jogjaplan. Komitmen tersebut diwujudkan dalam visi dan misi yang jelas serta mengomunikasikan visi dan misi tersebut. Hasilnya, Pemerintah DIY berhasil menerapkan Jogjaplan dan memperbaiki sistem perencanaan daerah.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mewujudkan penerapan Jogjaplan di seluruh SKPD, Pemerintah DIY melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM

melalui sosialisasi dan pelatihan serta penerbitan *user manual*. Kegiatan tersebut dilakukan secara berkala yaitu ketika ada pengembangan aplikasi. Adapun beberapa strategi yang dilakukan pengelola sistem ketika sosialisasi maupun pelatihan yaitu dengan mengajak pengguna sistem melakukan praktik langsung; rapat khusus atau rapat perencanaan yang diselipi dengan sosialisasi.

c. Regulasi

Jogjaplan merupakan produk inovatif dalam pelayanan publik. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi untuk mengatur dan “memaksa” pihak-pihak tertentu. Pada awal penerapan Jogjaplan ada beberapa pihak yang merasa terbebani. Mereka menganggap bahwa jika ada sistem baru akan diikuti dengan pekerjaan yang banyak dan lebih sulit. Menanggapi permasalahan itu, Pemerintah DIY mengeluarkan Peraturan Gubernur DIY No. 22 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai yang kemudian diubah menjadi Pergub No. 37.1 Tahun 2012. Pergub

tersebut mengatur mengenai *reward* dan *punishment* yang berdampak pada tunjangan pegawai.

Dalam pergub tersebut, salah satu kriteria dalam menilai kinerja instansi pemerintah ialah tentang perencanaan dan pengendalian program/kegiatan. Dengan demikian, jika SKPD ingin mendapatkan tambahan penghasilan, SKPD itu harus menggunakan Jogjaplan dalam proses perencanaan. Tujuan sistem *reward* dan *punishment*, selain untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, juga untuk menciptakan kompetisi yang sehat berbasis kinerja.

Adapun peraturan-peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung penerapan Jogjaplan, antara lain, sebagai berikut.

- a) Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2006 tentang *Blueprint Jogja Cyber Province*.
- b) Peraturan Gubernur DIY No. 48 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Program/Kegiatan

Pembangunan Daerah yang diubah menjadi Peraturan Gubernur DIY No. 73 Tahun 2013.

- c) Peraturan Gubernur DIY No. 69 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Koordinasi dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - d) Peraturan Gubernur DIY No. 45 Tahun 2014 Tentang Tata Cara dan Tatakala Perencanaan Disusun, Pelaksanaan Pengendalian, dan Evaluasi.
 - e) Pergub DIY No 22 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai yang diubah menjadi Pergub No. 37.1 Tahun 2012.
- d. Kelembagaan
- Kelembagaan berfungsi sebagai organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengembangan dan pengendali Jogjaplan. Jika tidak ada lembaga definitif yang berwenang dan bertanggung jawab, Jogjaplan sulit diterapkan dengan sukses. Lembaga yang bertanggung jawab

atas Jogjaplan ialah Bappeda DIY. Bappeda DIY terus mengembangkan Jogjaplan dengan tujuan memberikan kemudahan bagi para penggunanya.

Untuk membuat Jogjaplan lebih partisipatif, pada tahun 2015 kanal *form* usulan masyarakat dibuat dengan konsep *bottom up planning*. Melalui kanal itu, masyarakat dapat mengajukan usulan perencanaan pembangunan. Akan tetapi, usulan masyarakat yang masuk melalui Jogjaplan terus mengalami penurunan secara drastis setiap tahun sejak kanal tersebut dirilis tahun 2015. Sebagai pengendali, Bappeda DIY melakukan sistem buka tutup (mengunci) aplikasi Jogjaplan, serta melakukan verifikasi perencanaan SKPD.

- e. *Infrastruktur Jaringan dan Server*
Pemerintah DIY telah melakukan usaha-usaha menyediakan infrastruktur jaringan dan *server* untuk menjamin kelancaran akses Jogjaplan. Salah satunya ialah menyambungkan semua SKPD dengan jaringan internet dan

intranet yang menggunakan kabel *fiber optic* (FO). SKPD yang tidak terjangkau FO dapat menggunakan jaringan *wireless*. Selain itu, untuk memberikan akses lancar ketika membuka aplikasi, Pemerintah DIY menaikkan *bandwith* internet setiap tahunnya. Dalam hal *server* aplikasi, *server* Jogjaplan ditanam sendiri oleh Bappeda. Meskipun Pemerintah DIY terus melakukan perbaikan jaringan dan *server*, akses aplikasi Jogjaplan terkadang masih lambat saat terjadi akses bersamaan oleh SKPD.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Pemerintah DIY membangun dan menerapkan sistem teknologi informasi dibidang perencanaan pembangunan daerah. Sistem tersebut diwujudkan dalam bentuk aplikasi yang diberi nama Jogjaplan. Sejak tahun 2013, Jogjaplan mengantarkan Pemerintah DIY mendapatkan anugerah Pangripta Nusantara dari Bappenas sebagai provinsi yang memiliki perencanaan

terbaik. Adapun *critical success factor* (CSF) dalam penerapan sistem informasi perencanaan pembangunan di Pemerintah DIY (Jogjaplan), yaitu: komitmen pimpinan, sumber daya manusia, regulasi, kelembagaan, serta infrastruktur jaringan dan *server*.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi terkait penerapan Jogjaplan di Pemerintah DIY, yaitu sebagai berikut.

1. Pemerintah DIY perlu mempertahankan faktor sukses (*critical success factor*) yang telah dilakukan dengan baik dan meningkatkan faktor yang belum dilaksanakan secara optimal. Salah satu faktor yang dirasakan masih kurang oleh *user* Jogjaplan ialah akses aplikasi yang kurang lancar. Pemerintah DIY dapat terus meningkatkan *bandwidth* internet ke setiap SKPD, seperti yang telah direncanakan. Selain itu, pemerintah DIY sebaiknya memberikan batasan kuota pemakaian internet per hari untuk setiap orang dengan penggunaan *login* untuk akses ke internet. Dengan demikian, *bandwidth* internet yang digunakan untuk di luar keperluan kantor dapat diminimalisasi untuk menjamin akses aplikasi tetap lancar.
2. Bappeda DIY perlu melakukan sosialisasi Jogjaplan kepada masyarakat secara gencar. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan memasang iklan mengenai Jogjaplan. Bappeda DIY dapat menggunakan media iklan berupa *billboard*, baliho, megatron, atau videotron yang mudah dilihat sehingga menarik perhatian masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mengetahui tentang keberadaan dan fungsi aplikasi Jogjaplan, sehingga Jogjaplan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses perencanaan.
3. Pemerintah daerah lain yang saat ini sudah menerapkan *e-planning*, tetapi belum mencapai sasaran kesuksesan, dapat memperhatikan dan mempelajari CSF Pemerintah DIY dalam menerapkan Jogjaplan.

5.3 Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan penelitian ini, antara lain sebagai berikut.

1. Peneliti hanya melakukan wawancara kepada admin dan *user* Jogjaplan yang melakukan *input* data dan tidak melakukan wawancara kepada masyarakat. Peneliti agar melakukan wawancara kepada masyarakat sebagai pihak eksternal pemerintah, sebagai pengguna aplikasi Jogjaplan.
2. Penelitian ini hanya menggali faktor sukses dari sisi *input*. Penelitian selanjutnya dapat menambah faktor sukses dari sisi proses.
3. Pengambilan data (wawancara) ada yang dilakukan secara tertulis melalui *e-mail* dikarenakan alasan kesibukan pekerjaan narasumber. Hal tersebut membuat peneliti tidak dapat menggali informasi lebih dalam.

Daftar Pustaka

Andriariza, Yan. 2013. Analisis Penerapan E-Government Di Kabupaten Sragen. *Jurnal*

Penelitian Pos dan Informatika, Vol. 3 No. hlm: 50-66.

Bappeda DIY. 2014. Aplikasi Perencanaan. www.bappeda.jogjaprov.go.id, 03 April. Diakses tanggal 20 Februari 2017.
<http://bappeda.jogjaprov.go.id/produk/detail/Aplikasi-Perencanaan>

Bappenas. 2017. Apresiasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas Persembahkan Anugerah Pangripta Nusantara 2017. www.bappenas.go.id, 26 April. Diakses tanggal 20 Mei 2017.
<http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/apresiasi-perencanaan-pembangunan-kementerian-ppnbappenas-persembahkan-anugerah-pangripta-nusantara-2017/>.

Bullen, Christine V, dan John F. Rockart. 1981. A Primer on Critical Success Factors. *Sloan Working Paper* No. 1220-81, CISR No. 69

Djumadal, J. Surat. 2008. *Implementasi e-Government. Sebuah Harapan Penuh Tantangan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Proceeding Konferensi dan Temu Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Indonesia. Diakses tanggal 11 November 2016.

<http://iatt.kemenperin.go.id/tik/fullpaper/fullpaper152.pdf>.

- Esteves, Jose dan Pastor, Joan. 2000. Towards the Inification of Critical Success Factor for ERP Implementation. *Annual Business Information Technology (BIT) Conference*, Manchester.
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *E-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Markus, M. Lynne dan CornelisTanis. 2000. *The Enterprise System Experience from Adoption to Success, In Framing the Domains of IT Research Glimpsing The Future Through The Past*. R. W. Zmud, Ed., Cincinnati, Pinnaflex Educational Resources.
- Miles, Matthew B., dan Huberman, A. Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Nah, Fiona Fui-Hoon, K. M. Zuckweiler, dan Janet Lee-Shang Lau. 2003. ERP Implementation: Chief Information Officers' Perceptions of Critical Success Factors. *International Journal of Human Computer Interaction*, vol. 16, no. 1, pp. 5-22.
- Napitupulu, Darmawan. 2014. Studi Validitas dan Realibilitas Faktor Sukses Implementasi E-Government Berdasarkan Pendekatan Kappa. *Journal of Information Systems*, Volume 10, Issue 2.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pemerintah Republik Indonesia.
- Ram, Jiwat dan David Corkindale. 2014. How "Critical" are the Critical Success Factors (CSFs)?. *Business Process Management Journal*. Vol. 20 No. 1, hal. 151-174.
- Suryani, Eli. 2011. Analisis Faktor Kritis Keberhasilan pada Implementasi E-Procurement. *ComTech*, Vol.2 No. 2 Desember 2011: 1164-1171.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Republik Indonesia.
- World Bank. 2009. *E-Government Primer*. Washington: infoDev/World Bank.

